PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SEMESTER I TAHUN 2023

005.01.3100.664539

LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

BAGIAN ANGGARAN 005.01.3100.664539

Gorontalo, Juli 2023

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Juli 2023
SEKRETARIS

BENNY A.Y. WALUKOW,SE
NIP. 19741[illegible]8 200502 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D.Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	

(Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAIBA dan BMN dan lampiran lainya yang mendukung) seperti

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan

5. Laporan Pengembalian Pendapatan
6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Berita Acara Opname Fisik Persediaan
11. BAR Internal
12. Surat Hasil Rekonsiliasi
13. Dokumen Lainnya

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022	3
Tabel Neraca Per 31 Desember 2022	4
Tabel Laporan Operasional Per 31 Desember 2022	5
Tabel Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2022	6
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	13
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	17
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	19
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	20
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2022	20
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	21
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	22
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember TA. 2022 dan Per 31 Desember 2021	23
Tabel Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19	23
Tabel Perbandingan Belanja Modal Per 31 Desember TA.2022 dan Per 31 Desember 2021	24
Tabel Rincian Kas Lainnya Setara Kas Per 31 Desember 2022	25
Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022	25
Tabel Rincian Persediaan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	26
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	26
Tabel Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2022	27
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	27
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	28
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	29
Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	29
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2021	29
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember	30

Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 31
Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022 31
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain 31
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 32
Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 31 Desember TA. 2022 32
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember TA. 2022 33
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember TA. 2022 33
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember TA. 2022 34
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember TA. 2022 34
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember TA. 2022 35
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember TA. 2022 35
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember TA. 2022 36
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember TA. 2022 36
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas TA. 2022 39
Tabel Rincian Transfer Masuk/Keluar 40

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

Jl. Tinaloga No. 2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo – 96123
Telp/Fax : 0435-828070, 0435-8591262
Email : info@pt-gorontalo.go.id, Website : www.pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Juli 2023
SEKRETARIS

BENNY A.Y. WALUKOW,S.E
NIP 19741[illegible]8 200502 1 001

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahunan 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.560.738 atau mencapai 85 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp18.261.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.773.356.160 atau mencapai 41 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp16.462.892.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023.
Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.235.977.781; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp62.106.815; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp21.173.870.966; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp727.813.752 dan Rp20.508.164.029.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp12.536.243, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.846.820.544 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp7.834.284.301. Kegiatan Non Operasional dan

Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp2.450.250 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.831.834.051.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp21.564.833.908 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp7.831.834.051, kemudian ditambah dengan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.775.164.172 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp20.508.164.029.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Semester I Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23		% thd Angg	30-Jun-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	18,261,000	15,560,738	85.21	10,937,476
JUMLAH PENDAPATAN		**18,261,000**	**15,560,738**	**85.21**	**10,937,476**
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	14,080,181,000	5,683,342,910	40.36	6,458,237,986
Belanja Barang	B.4	2,382,711,000	1,090,013,250	45.75	1,363,547,394
Belanja Modal	B.5	-	-	#DIV/0!	92,193,000
JUMLAH BELANJA		**16,462,892,000**	**6,773,356,160**	**41.14**	**7,913,978,380**

II. N E R A C A

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
NERACA
PER 30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	50,100,000	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	-	10,887,777
Piutang Bukan Pajak	C.3	1,650,505	
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.4	1,650,505	
Persediaan	C.5	10,356,310	75,179,490
JUMLAH ASET LANCAR		**62,106,815**	**86,067,267**
ASET TETAP			
Tanah	C.6	7,602,649,000	7,602,649,000
Peralatan dan Mesin	C.7	5,175,325,041	5,155,475,041
Gedung dan Bangunan	C.8	14,922,950,200	14,922,950,200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	476,458,000	476,458,000
Aset Tetap Lainnya	C.10	28,199,905	28,199,905
Akumulasi Penyusutan	C.11	(7,031,711,180)	(6,706,511,075)
JUMLAH ASET TETAP		**21,173,870,966**	**21,479,221,071**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	29,985,000	29,985,000
Aset Lain-Lain	C.13	-	508,234,560
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.14	(29,985,000)	(535,994,810)
JUMLAH ASET LAINNYA		**-**	**2,224,750**
JUMLAH ASET		**21,235,977,781**	**21,567,513,088**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.15	673,170,652	2,679,180
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.16	4,543,100	-
Uang Muka dari KPPN	C.17	50,100,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**727,813,752**	**2,679,180**
JUMLAH KEWAJIBAN		**727,813,752**	**2,679,180**
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas	C.18	20,508,164,029	21,564,833,908
JUMLAH EKUITAS		**20,508,164,029**	**21,564,833,908**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**21,235,977,781**	**21,567,513,088**

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2023

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	30-Jun-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	12,536,243	12,775,189
JUMLAH PENDAPATAN		**12,536,243**	**12,775,189**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,323,212,562	8,205,831,152
Beban Persediaan	D.3	74,274,940	9,371,372
Beban Barang dan Jasa	D.4	781,112,589	1,057,513,390
Beban Pemeliharaan	D.5	203,934,998	253,556,521
Beban Perjalanan Dinas	D.6	141,566,600	206,973,100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	322,718,855	314,564,362
JUMLAH BEBAN		**7,846,820,544**	**10,047,809,897**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**(7,834,284,301)**	**(10,035,034,708)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8		
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		4,675,000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		2,224,750	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON		2,450,250	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**(7,831,834,051)**	**(10,035,034,708)**
POS LUAR BIASA	D.9		
Beban Luar Biasa		0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO		**(7,831,834,051)**	**(10,035,034,708)**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI GORONTALO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	30-Jun-22
EKUITAS AWAL	E.1	**21,564,833,908**	**21,814,641,382**
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(7,831,834,051)	(10,035,034,708)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	6,775,164,172	7,903,040,904
EKUITAS AKHIR	**E.5**	**20,508,164,029**	**19,682,647,578**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
21. Peraturan Menteri Keuangan Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung"

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesbilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Laporan Keuangan Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang

diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam pengelolaan anggaran DIPA dari Badan Urusan Administrasi adalah 13 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

NO	KODE SATKER	SATKER
1	664539	PENGADILAN TINGGI GORONTALO
2	099361	PENGADILAN NEGERI GORONTALO
3	400208	PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
4	477218	PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
5	670184	PENGADILAN NEGERI MARISA
6	440734	PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
7	307250	PENGADILAN AGAMA GORONTALO
8	402690	PENGADILAN AGAMA LIMBOTO
9	652130	PENGADILAN AGAMA TILAMUTA
10	682185	PENGADILAN AGAMA MARISA
11	401892	PENGADILAN AGAMA SUWAWA
12	401893	PENGADILAN AGAMA KWANDANG
13	401969	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak	10%

	dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

AsetTetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta

rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekapatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainyyya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dn tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jsa atau digunakan untuk tujuan lainya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan,	25 tahun

Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan,Hak Ekonomo Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta asta Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek
     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
     Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang
     Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hingga saat ini satker Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 4 (empat) kali revisi hingga akhir periode Semester I Tahun 2023 ini. Hal ini dapat dilihat dari rincian DIPA dibawah ini:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	18,261,000	15,560,738
Jumlah Pendapatan	**18,261,000**	**15,560,738**
Belanja		
Belanja Pegawai	14,080,181,000	14,080,181,000
Belanja Barang	2,382,711,000	2,382,711,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	**16,462,892,000**	**16,462,892,000**

Revisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Penyesuaian anggaran berupa pergeseran pada sub anggaran belanja barang.

Realisasi Pendapatan Rp15.560.738

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp15.560.738. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real. Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN,Iuran Badan Usaha	18,261,000	15,560,738	85.21
Jumlah	**18,261,000**	**15,560,738**	**85.21**

Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN per 30 Juni TA 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 42,27%. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu sewa rumah dinas yang ditempati oleh Ketua dan Wakil Ketua, Hakim Tinggi, beserta pejabat struktural dan pendapatan sewa kantin yang ada pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI T.A. 2023	REALISASI PER 30 JUNI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	4,675,000	0	#DIV/0!
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10,885,738	10,937,476	-0.47
Jumlah	**15,560,738**	**10,937,476**	**42.27**

Rumah dinas yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) unit namun yang dihuni sebanyak 5 (lima) unit. Sehingga perolehan pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan tersebut dari 5 (lima) unit rumah dinas yang ditinggali dan juga dari 30m^2 bidang tanah yang disewakan untuk kantin di area Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo

B. 2 Belanja

Realisasi Belanja Negara Rp6.773.356.160

Akumulasi Realisasi Belanja instansi per 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp6.773.356.287 dengan adanya pengembalian belanja sebesar Rp127 maka realisasi belanja *netto* Rp6.773.356.160 atau 41,14% dari anggaran belanja sebesar Rp16.462.892.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	14,080,181,000	5,683,343,037	40.36
Belanja Barang	2,382,711,000	1,090,013,250	45.75
Belanja Modal	0	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	**16,462,892,000**	**6,773,356,287**	41.14
Pengembalian		(127)	-
Jumlah	**16,462,892,000**	**6,773,356,160**	**41.14**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

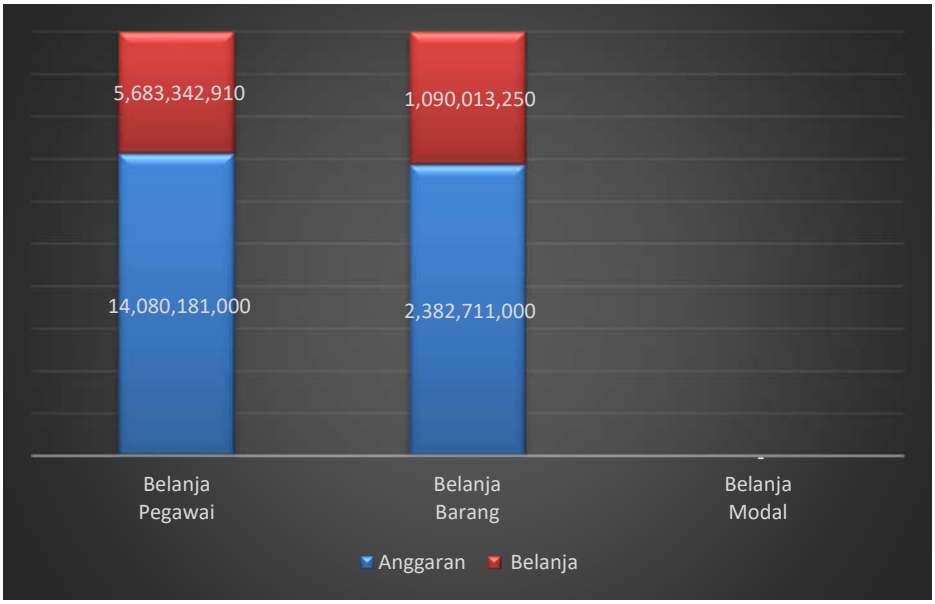

Dibandingkan dengan Belanja per 30 Juni TA 2022, total realisasi belanja per 30 Juni TA 2023 mengalami penurunan sebesar 14,41% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi belanja pegawai lebih rendah dari tahun sebelumnya karena dipengaruhi oleh jumlah pegawai yang mutasi keluar karena pindah;
2. Tidak terdapat realisasi belanja modal disebabkan tidak adanya anggaran belanja modal tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni TA 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5,683,342,910	6,458,237,986	(12.00)
Belanja Barang	1,090,013,250	1,363,547,394	(20.06)
Belanja Modal	-	92,193,000	(100.00)
Jumlah	**6,773,356,160**	**7,913,978,380**	**(14.41)**

Belanja Pegawai
Rp5.683.342.910

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.683.342.910 dan Rp6.458.237.986.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2023 turun sebesar 12,00% dari per 30 Juni TA 2022. Secara keseluruhan hal ini disebabkan antara lain oleh karena pada akhir tahun 2022 terjadi mutasi keluar (pindah tugas) sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, 7 (tujuh) orang Hakim Tinggi, 1 (satu) Pejabat Fungsional, dan 1 (satu) Pegawai Pelaksana. Sedangkan mutasi masuk berjumlah 5 (lima) orang, yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan 3 (tiga) orang Hakim Tinggi, sehingga menyebabkan penurunan pada realisasi belanja pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,023,311,037	5,823,455,986	(13.74)
Belanja Uang Makan PNS	157,582,000	170,032,000	(7.32)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	132,350,000	114,750,000	15.34
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	370,100,000	350,000,000	5.74
Jumlah Belanja Kotor	**5,683,343,037**	**6,458,237,986**	**(12.00)**
Pengembalian Belanja Pegawai	(127)		#DIV/0!
Jumlah Belanja	**5,683,342,910**	**6,458,237,986**	**(12.00)**

Belanja Barang
Rp1.090.013.250

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.090.013.250 dan Rp1.363.547.394. Realisasi belanja barang naik sebesar 20.06% dari tahun sebelumnya. Hal ini diantaranya karena per 30 Juni 2023 belum ada realisasi belanja barang non operasional yang terdiri dari belanja bahan dan belanja peralatan dan mesin ekstrakomptabel yang sudah dianggarkan sebelumnya.

Perbandingan Belanja Barang
per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	334,463,714	326,073,040	2.57
Belanja Barang Non Operasional	0	3,781,000	(100.00)
Belanja Barang Persediaan	34,497,656	16,855,372	104.67
Belanja Jasa	405,139,278	565,682,864	(28.38)
Belanja Pemeliharaan	174,346,002	244,182,018	(28.60)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	141,566,600	206,973,100	(31.60)
Jumlah Belanja Kotor	**1,090,013,250**	**1,363,547,394**	**(20.06)**
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	**1,090,013,250**	**1,363,547,394**	**(20.06)**

Satker Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah tidak lagi mengalokasikan anggaranterkait penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2023

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 30 Juni TA 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp92.193.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal sampai dengan akhir periode Tahunan TA 2022 turun sebesar 100% dibandingkan pada periode 30 Juni 2022 disebabkan oleh karena tidak adanya anggaran untuk belanja modal di tahun 2023.

Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	92,193,000	-100.00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0.00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00%
Belanja Modal Lainnya	0	0	0.00%
Jumlah Belanja Kotor	**0**	**92,193,000**	-100.00%
Pengembalian Belanja	0	0	0.00%
Jumlah Belanja	**0**	**92,193,000**	**(100.00)**

Realisasi belanja modal ini berupa belanja modal peralatan dan mesin yang berupa pengadaan pengolah data dan komunikasi serta pengadaan fasilitas perkantoran.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp50.100.000

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.100.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Perbandinga Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	30-Jun-23	30-Dec-22
Uang Tunai	50,100,000	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**50,100,000**	**-**

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Rp0

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp10.887.777. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

Rincian Belanja Dibayar Dimuka

Jenis	30-Jun-23	31-Dec-22
Sewa Web Hosting	-	10,887,777
Sewa Mesin Fotocopy sewilayah PT Gorontalo	-	
Jumlah	**-**	**10,887,777**

Piutang Bukan Pajak Rp1.650.505

C.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak berasal dari piutang lainnya yaitu berupa potongan SPM atas sewa rumah dinas pegawai.

Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.650.505 dan Rp0.

Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp1.650.505

C.4 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.650.505 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak (Netto) berupa potongan sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Hakim Tinggi pada SPM Gaji Bulan Juli 2023.

Perbandingan Rinciang Piutang Bukan Pajak

Jenis	30-Jun-23	31-Dec-22
Piutang Lainnya	1,650,505	-
Jumlah	**1,650,505**	**-**

Persediaan Rp10.356.310

C.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.356.310dan Rp75.179.490.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30-Jun-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	7,927,410	50,449,100
Bahan untuk Pemeliharaan	2,428,900	24,730,390
Jumlah	**10,356,310**	**75,179,490**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik dengan nomor : W20-U/1302/PL.07/VI/2023 tanggal 30 Juni 2023.

Pada saat periode pelaporan persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 telah nihil.

Tanah Rp7.602.649.000

C.6 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2023 masih sama dengan nilai aset per 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp7.602.649.000 dan Rp7.602.649.000.

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	**7,602,649,000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Selisih Revaluasi Aset	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2022	**7,602,649,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku per 30 Juni 2022	**7,602,649,000**

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah

NO	KIB	LUAS (m^2)	NO. SERTIFIKAT	ATAS NAMA	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	2	5,693	31.01.03.05.2.00037	PT. GORONTALO	Gedung Kantor PT. Gorontalo	5,845,918,000
2	4	10,986	30.01.08.04.4.00027	SP. PEMPROV GTLO	Gedung Kantor Lama PT. Gorontalo	550,730,000
3	1	780	31.01.05.08.2.00010	PT. GORONTALO	Rumah Dinas	302,865,000
4	1	1,940	31.01.05.08.2.00036	PT. GORONTALO		903,136,000
JUMLAH						**7,602,649,000**

Peralatan dan Mesin Rp5.175.325.041

C.7 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp5.175.325.041 dan Rp5.155.475.041.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**5,155,475,041**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	19,850,000
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Saldo per 30 Juni 2023	**5,175,325,041**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	4,515,314,723
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**660,010,318**

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Mutasi Tambah :

a. Transfer Masuk sebesar Rp19.850.000 berupa:

1. Komputer sebesar Rp19.850.000;

   Transfer masuk tersebut dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI

C.8 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Rp14.922.950.200

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp14.992.950.200 dan Rp14.992.950.200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**14,922,950,200**
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi kesalahan input IP	0
Saldo per 30 Juni 2023	**14,922,950,200**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(2,267,060,631)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**12,655,889,569**

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.9 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan,Irigasi dan Jaringan Rp476.458.000

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp476.458.000 dan Rp476.458.000. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**476,458,000**
Mutasi tambah:	
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi kesalahan input IP	0
Saldo per 30 Juni 2023	**476,458,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	233,847,826
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**242,610,174**

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.10 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya Rp28.199.905

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp28.199.905 dan Rp28.199.905. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	30-Jun-23	31-Dec-22
Buku Perpustakaan	12,711,905	12,711,905
Alat Musik Modern (Keyboard)	15,488,000	15,488,000
Jumlah	**28,199,905**	**28,199,905**

Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**28,199,905**
Mutasi tambah:	
Transfer masuk monografi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2023	**28,199,905**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	-15,488,000
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**12,711,905**

Buku Perpustakaan tidak mengalami penyusutan

Akumulasi Penyusutan AsetTetap (Rp7.031.711.180)

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilakukan pada setiap semester. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp7.031.711.180) dan (Rp6.706.511.075).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

[Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,175,325,041	4,515,314,723	660,010,318
2	Gedung dan Bangunan	14,922,950,200	2,267,060,631	12,655,889,569
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	476,458,000	233,847,826	242,610,174
4	Aset Tetap Lainnya	28,199,905	15,488,000	12,711,905
Akumulasi Penyusutan		**20,602,933,146**	**7,031,711,180**	**13,571,221,966**

Buku Perpustakaan yang merupakan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Rincian akumulasi penyusutan asset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Rp29.985.000

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp29.985.000 dan Rp29.985.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak

Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**29,985,000**
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2023	**29,985,000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(29,985,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**0**

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	29.985.000
Jumlah	**29.985.000**

Aset Lain-Lain Rp0

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp508.234.560. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Terdapat transaksi penghapusan BMN sebesar Rp508.234.560 sesuai dengan SK Sekma No. 533/SEK/SK/VI/2023 tgl 27 Juni 2023.

Adalapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2022	**508,234,560**
Mutasi tambah:	
Reklas dari Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	508,234,560
Saldo per 30 Juni 2023	**0**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	0
Nilai Buku per 30 Juni 2023	**0**

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Rp29.985.000)

C.14 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar (Rp29.985.000) dan Rp535.994.810. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud (Software)	29,985,000	29,985,000	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	**29,985,000**	**29,985,000**	**0**

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp673.170.652

C.15 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp673.170.652 dan Rp2.679.180. Utang pada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah		Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp	639,869,652	Gaji Pegawai Bulan Juli 2023
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp	33,301,000	Sudah SP2D
Total		**Rp**	**673,170,652**	

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp4.543.100

C.16 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2023 sebesar Rp4.543.100 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0. Merupakan BAST Persediaan yang dilakukan pertanggungjawaban/penggantian UP di bulan Juli 2023.

Uang Muka dari KPPN Rp50.100.000

C.17 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp50.100.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp20.508.164.029

C.18 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.508.164.029dan Rp21.564.833.908.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp12.536.243

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp12.536.243 dan Rp12.775.189. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	REALISASI PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN	**12,536,243**	**12,775,189**	**(1.91)**
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	12,536,243	**12,775,189**	**(1.91)**
Pendapatan Lain-Lain	**-**	**-**	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	
Jumlah	**12,536,243**	**12,775,189**	**(1.91)**

Pendapatan dari pemanfaatan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua dan pejabat struktural serta pendapatan atas sewa kantin yang ada dikantor Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Beban Pegawai Rp6.323.212.562

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.323.212.562 dan Rp8.205.831.152. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA 2023	PER 30 JUNI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	1,722,478,460	1,955,578,020	(13.53)
Beban Pembulatan Gaji	21,521	23,931	(11.20)
Beban Uang Makan PNS	157,582,000	170,032,000	(7.90)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	3,878,530,581	5,489,847,201	(41.54)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	144,500,000	132,300,000	8.44
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	420,100,000	458,050,000	(9.03)
Jumlah Beban Pegawai Kotor	**6,323,212,562**	**8,205,831,152**	(29.77)
Pengembalian Beban Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah	**6,323,212,562**	**8,205,831,152**	**(29.77)**

Beban Persediaan Rp74.274.940

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp74.274.940 dan Rp9.371.372. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2022	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	74,274,940	9,371,372	87.38
Jumlah Beban Persediaan	**74,274,940**	**9,371,372**	**87.38**

Beban Barang dan Jasa Rp781.112.589

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp781.112.589 dan Rp1.057.513.390. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2023	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional Lainnya	0	28,941,167	#DIV/0!
Beban Langganan Daya dan Jasa	16,762,098	80,824,850	-382.19
Beban Jasa Surat Dinas Pos Pusat	5,797,500	43,062,550	-642.78
Beban Sewa	396,585,777	575,655,000	-45.15
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	46,911,000	28,067,000	40.17
Beban Bahan	0	3,781,000	0.00
Beban Keperluan Perkantoran	315,056,214	297,181,823	5.67
Jumlah Beban Barang dan Jasa Kotor	**781,112,589**	**1,057,513,390**	**-35.39**
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tak Berwujud	0	0	**0.00**
Jumlah	**781,112,589**	**1,057,513,390**	**-35.39**

Beban Pemeliharaan Rp203.934.998

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp203.934.998 dan Rp253.556.521. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau

aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2023	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	77,445,475	124,345,421	-60.56
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9,859,562	28,639,700	-190.48
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,040,965	98,125,020	-12.73
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	29,588,996	2,446,380	91.73
Jumlah	**203,934,998**	**253,556,521**	**-24.33**

Beban Perjalanan Dinas Rp141.566.600

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp141.566.600 dan Rp206.973.100. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni Tahun 2022

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2023	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	137,066,600	203,973,100	-48.81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	3,000,000	33.33
Jumlah	**141,566,600**	**206,973,100**	-46.20

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp322.718.855

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2023 dan per 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp322.718.855 dan Rp314.564.362. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan

Amortisasi adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni Tahun 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 30 JUNI TA. 2023	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	144,856,753	136,279,678	5.92
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	163,241,675	163,241,675	0.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	14,620,427	14,620,426	0.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	422,583	0.00
Jumlah Beban Penyusutan	**322,718,855**	**314,564,362**	**2.53**
Beban Amortisasi Software	**0**	**0**	0.00
Jumlah Amortisasi	**0**	**0**	**0.00**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**322,718,855**	**314,564,362**	**2.53**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp2.450.250

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing Rp2.450.250 dan Rp0. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni Tahun 2023

URAIAN	PER 30 JUNI TA. 2023	PER 30 JUNI TA. 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,675,000	0	100.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2,224,750	0	100.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2,450,250**	**0**	**100.00**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, sedangkan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainya berasal dari Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

Dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*) maka tidak lagi terdapat penyesuian nilai persediaan dan beban penyesuiaan nilai persediaan yang mempengaruhi kegiatan non operasional. Adapun Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.450.250 merupakan selisih dari nilai Pendapatan Pelepasan Aset non Lancar berupa penjualan BMN berupa inventaris kantor sebesar Rp4.675.000 dengan Nilai Buku BMN yang dijual sebesar Rp2.224.750.

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan dan Beban yang sifatnya sering tidak terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp21.564.833.908

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.564.833.908 dan Rp21.814.641.382.

Defisit LO (Rp7.831.834.051)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp7.831.834.051) dan (Rp10.035.034.708). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp0

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan 0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2023 adalah Rp0 dan 30 Juni 2022 adalah Rp0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 30 Juni 2023 adalah Rp0 dan 30 Juni 2022 adalah Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada sat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	**-**

Transaksi Antar Entitas Rp6.775.164.172

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.775.164.172 dan Rp7.903.040.904.Transaksi Antar Entitas adalah Transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,773,356,160
Diterima dari Entitas Lain	15,560,738
Transfer Masuk	17,368,750
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	**6,775,164,172**

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023,

DDEL sebesar Rp15.560.738 sedangkan DKEL sebesar Rp6.773.356.160.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Tranfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada intenal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp17.368.750 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir Rp19.682.647.578

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.508.164.029 dan Rp19.682.647.578.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Sampai dengan periode 30 Juni Tahun Anggaran 2023 terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.01. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah *Virtual Account* atas nama BPG 050 Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 653246645391000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 REVISI DIPA

Sampai dengan 30 Juni 2023 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi terhadap DIPA sebanyak 4 (empat) kali yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 28 Desember 2022, berupa revisi *Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2022 sejumlah Rp156.032.000;
2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 16 Februari 2023, berupa pemutakhiran POK dan Penyesuaian belanja honor operasional satuan kerja dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. Revisi DIPA ke-03 tanggal 17 April 2023, berupa pemutakhiran POK revisi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA;

F.2.5 RALAT SPM, SSBP, DAN SSPB

F.2.5.1 RALAT SPM

Sampai dengan akhir periode 30 Juni 2023 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada ralat SPM.

F.2.5.2 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Sampai dengan akhir periode 30 Juni 2023 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada pengembalian belanja.

F.2.6 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 6/PA/SK/II/2022 tanggal 16 Februari 2022 telah ditunjuk Sdr. Benny A.Y Walukow, S.E – Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2221/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2220/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2222/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, terdapat penggantian Pejabat Pengelola Keuangan,

Semula:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Deddy S. Botutihe, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Ivan T. Ombuh, SE
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Menjadi:

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, S.H
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	: Nurmirnaningsi Otoluwa, S.E
Bendahara Pengeluaran	: Meyke Rahim, A.Md
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Lampiran A1

Pengadilan Tinggi Gorontalo
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2023

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31 Des' 2022	Beban Peny. Per 30 Juni' 2023	Total Akm. Peny. Per 30 Juni' 2023	Nilai Buku Per 30 Juni' 2023
A	**Tanah**						
1	Tanah	-	**7,602,649,000**	-	-	-	**7,602,649,000**
	Jumlah		**7,602,649,000**	-	-	-	**7,602,649,000**
B	**Peralatan dan Mesin**						
1	Alat Angkutan	7	1,087,793,556	(1,087,793,556)	0	(1,087,793,556)	0
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	1,704,500	(1,704,500)	0	(1,704,500)	0
3	Alat Pertanian	5	28,280,000	(28,280,000)	0	(28,280,000)	0
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4	2,232,644,620	(1,950,067,700)	(42,285,654)	(1,992,353,354)	240,291,266
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	575,558,590	(303,910,275)	(35,534,959)	(339,445,234)	236,113,356
6	Kursi Dorong	4	1,348,000	(674,000)	(134,800)	(808,800)	539,200
7	Alat Laboratorium	5	51,080,000	(13,464,417)	(2,862,042)	(16,326,459)	34,753,541
8	Komputer	5	1,196,915,775	(982,082,272)	(66,520,548)	(1,048,602,820)	148,312,955
	Jumlah		**5,175,325,041**	**(4,367,976,720)**	**(147,338,003)**	**(4,515,314,723)**	**660,010,318**
C	**Gedung dan Bangunan**						
1	Bangunan Gedung	50	14,038,318,200	(1,969,561,742)	(152,417,060)	(2,121,978,802)	11,916,339,398
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	884,632,000	(134,257,214)	(10,824,615)	(145,081,829)	739,550,171
	Jumlah		**14,922,950,200**	**(2,103,818,956)**	**(163,241,675)**	**(2,267,060,631)**	**12,655,889,569**
D	**Jalan dan Jembatan**						
1	Jalan Khusus Kompleks	40	130,129,000	(114,261,503)	(7,933,749)	(122,195,252)	**7,933,748**
	Jumlah		**130,129,000**	**(114,261,503)**	**(7,933,749)**	**(122,195,252)**	**7,933,748**
E	**Irigasi**						
1	Bangunan Air	40	48,804,000	(42,868,771)	(2,967,615.)	(45,836,386)	**2,967,614**
	Jumlah		**48,804,000**	**(42,868,771)**	**(2,967,615)**	**(45,836,386)**	**2,967,614**
F	**Jaringan**						
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40	99,995,000	(29,998,500)	(1,249,938)	(31,248,438)	**68,746,562**
2	Jaringan Listrik Lainnya	40	197,530,000	(32,098,625)	(2,469,125)	(34,567,750)	**162,962,250**
	Jumlah		**297,525,000**	**(62,097,125)**	**(3,719,063)**	**-65,816,188**	**231,708,812**
G	**Aset Tetap Lainnya**						
1	Alat Musik Modern/Band	40	15,488,000	(15,488,000)	-	(15,488,000)	-
2	Buku Perpustakaan		12,711,905	-	-	-	12,711,905
	Jumlah		**28,199,905**	**(15,488,000)**	**-**	**(15,488,000)**	**12,711,905**
H	**Software**						
1	Aset Tak Berwujud	4	29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
	Jumlah		**29,985,000**	**29,985,000**	**-**	**29,985,000**	**-**
I	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerntahan**						
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga		-	(217,841,575)	217,841,575	-	-
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		-	(3,685,000)	3,685,000	-	-
3	Alat Laboratorium		-	(10,452,750)	10,452,750	-	-
4	Komputer		-	(274,030,485)	274,030,485	-	-
	Jumlah		**0**	**(506,009,810)**	**506,009,810**	**0**	**-**
Total			**28,235,567,146**	**(7,182,535,885)**	**180,809,705**	**(7,001,726,180)**	**21,173,870,966**

**Tanah dan buku tidak mengalami penyusutan*